

# Hambatan Iran dalam Kerjasama Pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) di Indonesia

Hadi Sadewo<sup>1</sup>, Aisyah<sup>2</sup>, Arif Wicaksa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman (hadisadewo5@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman (aisyah.aisyah@fisip.unmul.ac.id)

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman (arif.wicaksa@fisip.unmul.ac.id)

Submitted: 20 Agustus 2021; accepted: 30 November 2021

## ABSTRACT

*Iran and Indonesia have signed an agreement on the electricity sector in 2016, where Iran committed to build a 5000 Megawatt (MW) Mobile Power Plant within five years as part of the Indonesian government's target to fulfill the national need of 35.000 MW by 2020. However, until the end of the cooperation span, Iran has not taken any steps for the construction of the MPP at all. The Indonesian government cannot do much considering the agreement is very depending on Iran as an investor. External and internal factors such as the United States' economic embargo towards Iran in 2018, Iran's involvement on the conflict in Yemen, and MPP technology which is still in the development stage seem to be obstacles for Iran to realize the cooperation mentioned above.*

**Keywords:** *Cooperation, Iran, Indonesia, Mobile Power Plant, Obstacles*

## ABSTRAK

Iran dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam bidang ketenagalistrikan pada 2016, dimana dalam salah satu poin kerjasama disebutkan bahwa Iran berkomitmen untuk membangun Pembangkit Listrik Bergerak atau *Mobile Power Plant* sebesar 5000 Megawatt (MW) dalam jangka waktu lima tahun sebagai bagian dari pencapaian target pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional sebesar 35.000 MW pada tahun 2020. Namun hingga berakhirnya periode kerjasama tersebut, Iran sama sekali belum melakukan langkah apa pun untuk pembangunan MPP ini. Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak mengingat kesepakatan kerjasama ini sangat bergantung kepada Iran yang menjadi investor. Faktor-faktor eksternal dan internal seperti embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran pada 2018, keterlibatan Iran dalam konflik di Yaman, dan teknologi MPP yang relative baru dan masih dalam tahap perkembangan nampaknya menjadi hambatan bagi Iran untuk merealisasikan kerjasama yang disebutkan diatas.

**Kata Kunci:** *Kerjasama, Iran, Indonesia, Mobile Power Plant, Hambatan*

## PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Jaminan akan keamanan energi (*energy security*) menjadi sangat penting bagi setiap negara karena dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi, kebutuhan dasar manusia bahkan kestabilan negara (Kalicki and Goldwin, 2005: 98). Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memastikan kebutuhan energinya terpenuhi, baik melalui pengelolaan sumber daya energi yang mereka punya maupun melalui kerjasama dengan negara lain, seperti kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Iran.

Kerjasama antara Indonesia dan Iran terkait pemenuhan energi dalam negeri Indonesia tertuang dalam kerjasama “Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan” yang diresmikan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 14 Desember 2016 di Tehran, Iran oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Indonesia Ignasius Jonan dan Menteri Energi Iran Hamid Chitiran yang mencakup pengembangan pembangkit listrik; transmisi dan distribusi; pertukaran pengalaman mengenai pusat perbaikan pembangkit listrik; pengembangan energi terbarukan; mendorong dan meningkatkan investasi; mendorong untuk melakukan dialog kebijakan; dan bidang-bidang lain yang disepakati para pihak. Untuk pelaksana dari kerjasama tersebut adalah Pertamina dan PLN dari pihak Indonesia, serta dengan National Iranian Oil Company (NIOC) dan Mapna Group (Iran Power Plant Projects Management Company) sebagai *Independent Power Producer* (IPP) dari Iran (esdm.go.id: 2016).

Salah satu poin dalam kesepakatan kerjasama tersebut adalah mengenai pengembangan pembangkit listrik berupa pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) sebesar 5000 MW yang titik pembangunannya disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berlaku di Indonesia. MPP adalah alat pembangkit tenaga listrik yang ditenagai oleh gas. Keunggulan utama alat ini adalah bisa dipindah-pindah ke wilayah mana pun yang membutuhkan. Teknologinya juga memungkinkan untuk bisa dibangun dimana saja sehingga pengerjaan alat tersebut sangat fleksibel. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk membangun alat ini hanya sekitar 5 hingga 6 bulan saja, lebih cepat dibandingkan alat pembangkit biasa yang memakan waktu hingga 6 tahun.

Iran tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena adanya program pemerintah Indonesia untuk membangun 35.000 MW energi listrik yang dimulai sejak tahun 2015 hingga 2020, yaitu berupa pembangunan infrastruktur energi listrik dengan 397 unit pembangkit listrik yang ada di Indonesia agar semua wilayah di Indonesia tercukupi kebutuhan energi listriknya dan rasio elektrifikasi Indonesia bisa mencapai 100%. Wilayah sebaran untuk proyek ini yaitu Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kaltim, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (setkab.go.id: 2015).

Bagi Indonesia, kerjasama ini jelas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya sementara bagi Iran kerjasama ini merupakan momentum untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang mengalami krisis akibat sanksi ekonomi PBB tahun 2012-2015 dimana sebagai pertukaran investasi pembangunan MPP oleh Iran adalah Indonesia mengimpor gas Iran sebesar 500 ribu metrik (esdm.go.id, 2020)

Hingga tahun 2020, perkembangan proyek 35.000 MW pemerintah Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Terlihat pada tahun 2017 energi listrik baru mencapai 1.061 MW atau sebesar 3%, tahun 2018 sebesar 2.899 MW atau 8%, dan tahun 2019 sebesar 3.617 MW atau 11%, dan tahun 2020 sebesar 8.187 MW atau 23% dari total daya yang ditargetkan (Primadhyta: 2018, esdm.go.id: 2020). Ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek ini belum berjalan baik dari sisi Indonesia maupun Iran, diantaranya pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun karena tidak sesuai target peningkatan ekonomi 6-7% per tahun; kendala pembebasan lahan di beberapa wilayah yang akan dibangun alat pembangkit listrik, dan kesiapan *Independent Power Producer* (IPP) yaitu pihak swasta yang membantu pelaksanaan proyek ini, baik dari dalam negeri maupun dari negara lain. Kondisi ini menyebabkan target dari proyek 35.000 Megawatt yang harusnya selesai pada tahun 2019 terundur hingga tahun 2029 (Indraini: 2020).

Hingga berakhirnya periode kerjasama yang disepakati dengan Indonesia, pihak Iran tidak bisa memastikan keberlanjutan proyek kerjasama tersebut. Dibuktikan ketika pada tahun 2017 bersamaan dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ke Iran dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden Hassan Rouhani, pembahasan mengenai komitmen investasi Iran di sektor kelistrikan juga dipertanyakan dalam kesempatan yang berbeda (Zuraya: 2017). Selain itu, pada tahun 2018 masalah pembangunan MPP ini juga sempat didiskusikan di sela-sela pertemuan antara wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar dan wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta (Kompas: 2018). Namun dari beberapa kunjungan tersebut pihak Iran masih

terasa tetap tidak bisa memastikan kelanjutan dari kerjasama tersebut. Bahkan berdasarkan konfirmasi dari pihak kementerian ESDM serta urusan Timur Tengah bahwa hingga April 2020 pihak Iran tidak memberikan pernyataan resmi mengenai kelangsungan kerjasama ini sehingga bisa dikatakan bahwa hambatan terbesar dalam pelaksanaan kerjasama ini berada di pihak Iran.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tulisannya yang berjudul *The Impact of Sanctions on the Economy of Iran*, Majidi dan Zarouni (2016) menyebutkan bahwa sanksi telah mempengaruhi sebagian besar ekonomi Iran; membatasi akses ke keuangan dan devisa, penurunan investasi, meningkatnya pengangguran dan inflasi serta menyebabkan perlambatan ekonomi. Namun, sanksi tersebut juga membuat Iran termotivasi untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada minyak, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mengurangi kerentanan terhadap faktor eksternal.

Meskipun banyak faktor yang terlibat dalam keterbelakangan ekonomi Iran, seperti struktur ekonomi, defisit perdagangan, kelemahan sektor swasta, inflasi, kemiskinan, salah urus, korupsi dan kelemahan ekonomi, hukum, ekonomi dan spekulasi, namun faktor eksternal seperti investasi asing langsung yang rendah dan sanksi itu sendiri sangat berdampak besar terhadap ekonomi Iran.

Amerika Serikat dan Uni Eropa mencoba memotong sumber pendapatan Iran dan mengacaukan jalur kehidupan ekonominya untuk mengubah perilaku Iran dalam program nuklirnya.

Dampak awal sanksi keuangan dari investasi Amerika untuk membiayai proyek-proyek pembangunan adalah pada minyak di Iran karena intensitas modal industri selalu besar dan modal dalam jumlah besar untuk pengembangan sektor ini diperlukan. Pengembangan ladang minyak membutuhkan investasi yang tinggi sehingga Iran tidak memiliki dana tersebut dan juga karena situasi

internasional menyebabkan Iran tidak dapat melakukan pinjaman. Sanksi terhadap Iran berdampak sangat besar terhadap variabel makro ekonomi Iran seperti terjadinya inflasi dan penurunan nilai tukar, peningkatan jumlah pengangguran, berkurangnya investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, selain berdampak pada volume perdagangan dan aktivitas industrinya.

Sanksi ekonomi yang dialami Iran yang berdampak terhadap ekonominya juga berimplikasi terhadap kerjasama Iran dengan beberapa negara mitranya. Seperti dengan India (Soltaninejad: 2017) dimana hubungan AS dan India yang cukup dekat dan tekanan AS kepada India untuk mengurangi ketergantungan minyak dari Iran dan membatasi kerjasama antara kedua negara.

Kerjasama Iran dengan Pakistan juga mengalami gangguan akibat perekonomian Iran yang tidak stabil terutama disebabkan oleh sanksi Barat terhadap negara itu (Aulia: 2019).

Michnalita (2021) juga pernah membuat kajian mengenai hambatan dalam kerjasama Iran dan Indonesia dalam bidang ketenagalistrikan yang diakibatkan oleh sanksi unilateral Amerika Serikat, meskipun Michnalita tidak merinci atau membatasi pada satu poin dalam kerjasama kedua negara tersebut yang mengalami dampak.

## **METODE RISET**

Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif melalui tahapan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menganalisis fenomena atau menguji hipotesis, terkait hambatan yang dialami Iran dalam kerjasama pembangunan MPP di Indonesia yang sedianya selesai pada tahun 2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang diakses melalui media internet. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif.

## **KERANGKA TEORITIS**

Untuk menganalisis apa yang menjadi hambatan Iran dalam kerjasama pembangunan MPP di Indonesia ini, penulis menggunakan teori kerjasama bilateral.

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik dan struktur ekonomi (Kusumohamidjojo, 1987: 95). Hubungan bilateral juga bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara kedua pihak atau dua negara (Krisna, 1993:18). Biasanya kerjasama bilateral mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam kerjasama tersebut dan berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat. Kerjasama tersebut dapat dikatakan berakhir apabila telah mencapai tujuan dari kerjasama tersebut, periode kerjasama selesai, adanya kesepakatan untuk mengakhiri sesuai dengan prosedur kerjasama, adanya pelanggaran salah satu pihak, diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dan diterimanya hal itu oleh pihak lain, atupun merugikan kepentingan nasional (Starke, 2001:2)

Kerjasama antar negara tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ada faktor-faktor yang dapat menghambat kerjasama yakni, adanya keinginan dari pemimpin yang sedang berkuasa untuk mengubah kesepakatan kerjasama yang ada seperti pemimpin baru di negara tersebut yang memiliki kebijakan baru untuk membuat perubahan; advokasi birokrasi yaitu proses keikutsertaan masyarakat dalam mengubah kebijakan; restrukturisasi domestik suatu negara yaitu upaya dalam negeri untuk memperbaiki

permasalahan domestik; kondisi internal yang mempengaruhi negara baik berupa demonstrasi maupun pertentangan terhadap kebijakan pemerintah; serta terjadinya *external shock* yaitu pengaruh dari luar sistem ekonomi domestik yang tidak bisa diprediksi seperti embargo, dan krisis keuangan global (Jakob, Gustavsson, 1999: 76).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pemenuhan kebutuhan energi listrik sudah sejak lama dihadapi pemerintah Indonesia terutama terkait pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan tenaga listrik di Indonesia juga tidak terdistribusi secara merata. Ini terefleksi dari rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita tahun 2011 yang sangat bervariasi diantara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh DKI Jakarta memiliki rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita yang paling tinggi mencapai 103%, mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki ketersediaan listrik paling tinggi di Indonesia. Sebaliknya, Sulawesi Barat memiliki rasio elektrifikasi terendah yaitu 33%, sedangkan NTT teridentifikasi sebagai daerah dengan konsumsi listrik per kapita terendah sebesar 101 KWh dengan rasio elektrifikasi 34,5%. Selain itu, data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa Jawa memiliki tingkat ketersediaan tenaga listrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa (Adam: 2016).

Data dari *Handbook of Energy & Economic Statistic* Kementerian ESDM tahun 2013 menunjukan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia hanya sebesar 76,56% masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia 99,4%, Vietnam 97,6%, Thailand 87,7%, dan Filipina 83,3%. Hal Ini berarti bahwa secara nasional ada sekitar 23,44% masyarakat yang sama sekali belum memiliki akses untuk menikmati listrik. Di wilayah timur Indonesia, bahkan banyak daerah yang tingkat elektrifikasinya masih jauh di bawah 50%. Terlambatnya Indonesia membangun infrastruktur kelistrikan membuat ketersediaan tenaga listrik di negeri ini tidak cukup untuk

memenuhi tingkat kebutuhannya. Akibatnya, kelistrikan belum benar-benar optimal berperan sebagai pendorong pembangunan ekonomi (esdm.go.id: 2018).

Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan diatas, salah satunya adalah akses menuju wilayah atau daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasinya melalui berbagai kebijakan maupun proyek kerjasama ketenagalistrikan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan Program Energi Listrik 35.000 MW yang dimulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2020 yaitu berupa pembangunan infrastruktur energi listrik dengan 397 unit pembangkit listrik yang ada di Indonesia agar semua wilayah di Indonesia bisa terjangkau oleh energi listrik dan rasio elektrifikasi Indonesia bisa mencapai 100%. Untuk memenuhi proyek tersebut maka Indonesia juga membuka peluang bagi negara lain yang ingin berinvestasi ataupun bekerjasama dengan sistem IPP. Salah satu negara yang tertarik adalah Iran dalam hal ini berupa pembangunan MPP yang akan dibangun di Indonesia sebesar 5000 MW.

Gambar 1. Mobile Power Plant



Kontrak kerjasama ini diresmikan tahun 2016 dan ditargetkan rampung tahun 2020. Namun hingga lewat periode kerjasama yang disepakati selama lima tahun pihak Iran masih belum merealisasikan komitmen dalam kerjasama tersebut karena ada beberapa hambatan baik secara internal dan eksternal.

### **Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran**

Embargo ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat (AS) ke Iran merupakan pelarangan perdagangan, terutama ekspor energi Iran ke negara-negara yang biasa bekerjasama dengan Iran. Embargo ini beberapa kali dicabut namun kemudian kembali dijatuhkan terhadap Iran sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Iran.

Embargo terhadap Iran dimulai tahun 2012 oleh AS dan Uni Eropa (UE) berupa sanksi ekonomi karena Iran dipercayai mengembangkan energi uranium yang tidak sesuai standar International Atomic Energy Agency (IAEA). Iran tidak memaparkan sejauh mana proses yang mereka lakukan sehingga menimbulkan kecurigaan negara-negara, terutama AS dan UE bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. IAEA beberapa kali berusaha mengunjungi instalasi nuklir Parchin di Tehran namun selalu gagal akibat tidak diberi izin oleh otoritas Iran yang menyebabkan ketegangan hubungan Iran-Barat. Pengelolaan uranium yang terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah Iran tersebut yang menyebabkan Iran dikenai sanksi ekonomi berupa pembekuan semua transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan bank sentral Iran dan memblokir semua aset pemerintah Iran di AS serta melarang perdagangan logam mulia emas, berlian, dan barang berharga milik badan publik Iran di Eropa. Kebijakan tersebut diambil UE karena penolakan Iran bernegosiasi serta kekhawatiran UE terhadap Israel dan AS yang akan melakukan aksi militer kepada Iran apabila tekanan ekonomi gagal.

Pada tahun 2013, AS kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran berupa embargo minyak yang semakin mempersempit ruang gerak perekonomian Iran. Tujuan dari sanksi AS tersebut untuk menaikkan biaya dari semua kegiatan jual beli

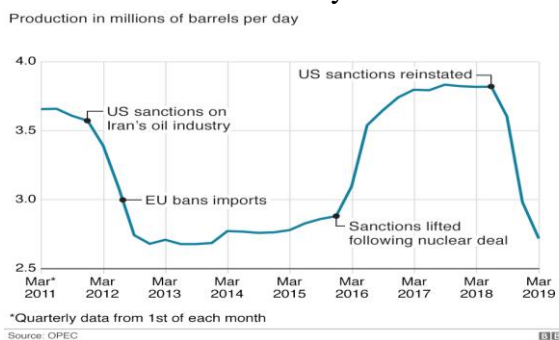
minyak Iran hingga menimbulkan kesulitan sedemikian rupa bagi para mitra dagangnya dalam berbisnis dengan Iran. Kesulitan melakukan transaksi keuangan akan menyebabkan Iran ditinggalkan oleh semua mitra dagangnya, perekonomian Iran akan melemah dan memaksa Iran melakukan perundingan dengan UE dan AS agar sanksi tersebut bisa segera dicabut.

Setelah melalui beberapa perundingan dalam *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada 2015 yang terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa dan Iran sendiri, sanksi terhadap Iran dicabut pada tahun 2016 sehingga ekonomi Iran berangsur membaik pada saat itu.

Namun pada saat AS keluar dari kesepakatan JCPOA pada 2018 di masa pemerintahan Donald Trump, sanksi terhadap Iran kembali dikenai sanksi oleh AS. Kondisi ini lagi-lagi mempersulit ekonomi Iran dimana sanksi tersebut meliputi sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, dan perdagangan. Tidak sampai di situ saja karena ada sanksi lain meliputi sektor migas dan bank sentral. Akibat sanksi tersebut nilai mata uang Iran jatuh lebih dari 50% yang memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang signifikan (Fiansyah: 2018).

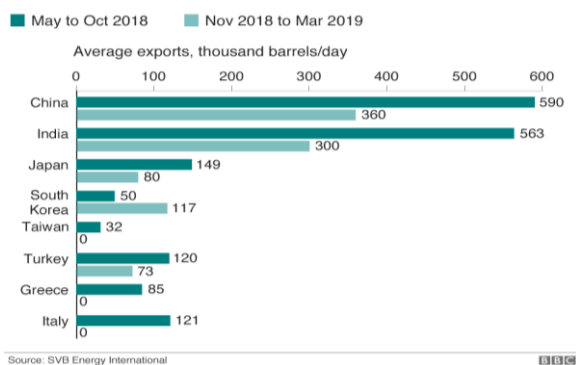
Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS tahun 2018, berdampak pada menurunnya jumlah produksi dan ekspor minyak Iran yang merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kelangsungan kerjasama Iran dengan negara lain, terutama kesulitan untuk melakukan investasi seperti yang dialaminya dalam kerjasama dengan Indonesia.

Gambar 2. Produksi Minyak Iran 2011-2019



Sumber: [bbc.com/news/amp/world-middle-east-48119109](http://bbc.com/news/amp/world-middle-east-48119109)

Gambar 3. Ekspor Minyak Iran Pasca Sanksi AS Tahun 2018



Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109>

### Keterlibatan Iran Dalam Konflik di Yaman

Selain embargo AS terhadap Iran, keterlibatan Iran dalam mendukung kelompok Houthi yang berkonflik dengan pemerintah Yaman juga menjadi faktor penghambat Iran merealisasikan komitmennya terhadap pembangunan MPP di Indonesia. Iran memberikan bantuan persenjataan, bahan pangan, pelatihan militer, bantuan tentara nasional Iran dan bantuan lainnya yang bisa melancarkan gerakan kelompok Houthi di Yaman sejak 2015 hingga saat ini. Kondisi ekonomi Iran yang tidak stabil semenjak dijatuhi sanksi semakin memperburuk kondisi keuangan negara ini karena Iran masih terus berupaya mendukung kelompok Houthi di Yaman.

Bantuan Iran terhadap Houthi yang berhaluan syi'ah sebetulnya sudah dilakukan

sejak tahun 2005, karena memang konflik antara Houthi dan pemerintah Yaman sudah berlangsung sejak lama. Iran mendanai pembelian roket dan melatih petempur di Propinsi Sa'ada. Selain itu pada saat terjadi pemberontakan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman pada bulan April 2009, telah ditemukan kapal Iran bernama Mahan yang berisi senjata yang muatannya akan diturunkan di kota Harad yang terletak di provinsi Sa'ada untuk dibawa ke sebuah peternakan di Yaman dan kemudian akan diambil oleh Houthi (Charin, 2016: 9). Laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengindikasikan bahwa Iran telah mendukung kelompok Houthi sejak tahun-tahun awal pemberontakan kelompok militan Syiah tersebut.

Tahun 2013, Iran mengirim kapal untuk kelompok Houthi yang bernama Jihan yang mengangkut 40 ton senjata seperti roket Katyusha M-122, *heat-seeking surface-to-air missiles*, RPG-7s, *night vision goggles* buatan Iran, sistem artileri yang melacak tanah dan angkatan laut dengan target sejauh 40 km, ada juga *silencer*, 2,66 ton bahan peledak RDX, C-4 bahan peledak, amunisi, peluru dan transistor listrik.

Bantuan Iran berlanjut pada 28 Februari 2015 dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Houthi untuk mengadakan penerbangan udara langsung antara Teheran dan Sana'a sebanyak 28 kali dalam sepekan (Landry: 2015). Iran dan Houthi juga mengadakan perjanjian kemitraan ekonomi pada 12 Maret 2015, termasuk kesepakatan pasokan minyak dari Iran selama satu tahun (Aljazeera: 2015).

Pada tanggal 11 Mei 2015, Iran mengirim kapalnya bernama Iran Shahed yang berisi 2.400 ton makanan seperti tepung, beras dan gula, serta 100 ton obat-obatan yang



ditujukan kepada Houthi. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2015, kembali ditemukan kapal Iran yang dilaporkan telah membawa bantuan 8.000 ton beras dan 1000 ton gula dari pelabuhan Imam Khomeini.

Selain memberikan persenjataan atau artileri terhadap pemberontak Houthi Iran juga memberikan pelatihan bagi ribuan pemberontak Houthi Yaman di kamp pelatihan Suriah Selatan sejak tahun 2015. Pemberontak ini dikumpulkan di Iran dan kemudian diterbangkan ke Suriah, ada yang berkumpul di Beirut dan diangkut melalui jalur darat ke Suriah. Adanya pelatihan ini mendorong kelompok Houthi untuk sigap dan siap di medan pertempuran (Charin, 2016: 11).

Menurut salah satu petinggi militer Arab Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed al-Assiri, kelompok Houthi memperoleh dana dari Iran untuk membayar pasukannya sebesar 100 dollar AS per hari. Dengan iming-iming bayaran tersebut Houthi berhasil merekrut masyarakat Yaman sebagai bagian dari pasukannya.

Berbagai bantuan yang diberikan tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap kelompok Houthi di Yaman merupakan salah satu prioritas Iran dalam kebijakan luar negerinya meskipun secara ekonomi terlihat tidak menguntungkan bagi Iran, bahkan menyebabkan kerjasama Iran dengan beberapa negara lain terganggu, termasuk kerjasama dengan Indonesia untuk pembangunan MPP.

### **Teknologi Turbin Buatan Iran**

Peluncuran MPP di Iran menjadi penghambat dalam membangun MPP di Indonesia karena Iran baru pertama kali menjadikan turbin menjadi MPP atau pembangkit listrik bergerak di negaranya pada Juni tahun 2017 di Iran Utara yaitu di kota

Noshahr dan Behshahr. Peluncuran pembangkit ini memunculkan keraguan karena masih relatif baru.

Kapasitas listrik yang telah dibangun di Iran hanya 25 MW (en.mehrnews.com: 2017). Peluncuran Pembangkit listrik yang diimplementasikan tersebut dapat dipasang dan diluncurkan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Menurut MAPNA, stasiun tersebut dapat memasuki jaringan listrik dalam waktu kurang dari 25 menit dan dapat berfungsi dengan bahan bakar gas dan solar.

Setelah dua MPP tersebut beroperasi, pemerintah Iran mengatakan selanjutnya Iran akan bergabung dengan AS, Jerman, dan Rusia untuk memperoleh pengetahuan tentang cara membuat pembangkit listrik bergerak agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pembangkit listrik bergerak. Dari pengaplikasian MPP di dua tempat pada tahun 2017 tersebut, menunjukkan bahwa Iran baru bisa menerapkan teknologinya terhadap pembangkit listrik Mobile atau bergerak di negaranya sendiri pasca kontrak kerjasama dengan Indonesia dilakukan yaitu akhir tahun 2016 mengenai rencana pembangunan MPP di Indonesia sebesar 5000 MW.

Berdasarkan perjanjian awal pembangunan MPP tersebut titik pembangunannya disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan listrik di wilayah Indonesia. Ini berarti jika disesuaikan dengan rencana pembangunan listrik Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 yaitu ada 156 lokasi yang dibangun oleh PLN dan 135 titik lokasi dibangun oleh pihak swasta atau investor termasuk Iran dengan mekanisme IPP atau kurang lebih 397 unit pembangkit listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Iran belum bisa menerapkan atau membangun MPP di Indonesia karena negara mereka sendiri baru mengaplikasikan teknologi tersebut. Ditambah lagi pada 2018 Iran baru belajar



untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang pembangkit bergerak atau MPP yang berarti Iran sendiri masih berupaya untuk meningkatkan kemampuannya untuk bisa benar benar membuat pembangkit yang berstandar Internasional.

Kondisi ini pula yang membuat penulis berasumsi bahwa Iran masih berupaya untuk menyesuaikan diri untuk membangun MPP di Indonesia.

### KESIMPULAN

Meningkatnya kebutuhan energi di Indonesia khususnya energi listrik, mengharuskan Indonesia melakukan kerjasama guna memenuhi kebutuhan energi tersebut, melalui kerjasama pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) dengan Iran yang dimulai akhir tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam kerjasama pembangunan MPP ini, Iran menjanjikan untuk membangun MPP sebesar 5000 MW. Pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan dengan menagih kembali komitmen Iran mengenai pembangunan pembangkit listrik ini. Namun, pihak Iran masih belum bisa memutuskan kelanjutan dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat 3 hambatan Iran dalam pembangunan MPP di Indonesia. Hambatan yang pertama adalah *external shock* yaitu berupa hambatan ekonomi terkait embargo ekonomi yang diberikan AS. Embargo ini beberapa kali dicabut kemudian kembali diberikan terhadap Iran sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Iran. Belum lagi pada tahun 2017 terdapat beberapa kasus dalam negeri Iran yang menyangkut keuangan sehingga membuat kondisi internal di Iran mengalami pengaruh padahal Iran baru saja lepas dari sanksi AS pada awal tahun 2016. Dampak embargo yang dialami Iran juga berpengaruh

terhadap bank sentral, sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, perdagangan, pendapatan dari ekspor impor minyak Iran dan sanksi tersebut juga mempengaruhi transportasi maupun jalur yang digunakan oleh Iran untuk melakukan pengiriman komoditas ekspor-impor.

Faktor penghambat kedua adalah keterlibatan Iran dalam konflik Yaman khususnya bantuan untuk kelompok Houthi berupa bantuan persenjataan, bahan pangan, pelatihan militer, bantuan tentara nasional Iran dan bantuan lainnya yang bisa melancarkan gerakan kelompok Houthi di Yaman sejak 2015 hingga sekarang. Bila dilihat pada tahun 2015 Iran masih dilanda krisis ekonomi kemudian di tahun 2018 dijatuhkan embargo ekonomi oleh AS, tetapi Iran masih berupaya mendukung kelompok Houthi di Yaman.

Faktor penghambat ketiga yaitu dari sisi internal Iran yang baru pertama kali menerapkan pembuatan MPP teknologi turbin tahun 2017.

### REFERENSI

- Adam, Latif. (2016). *Dinamika sektor kelistrikan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 24 No.1. Tersedia di <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/view/160>
- Aljazeera.com. (2015). Tersedia di <https://www.aljazeera.com/news/2015/3/14/houthis-say-they-have-secured-aid-package-from-iran>
- Charin, Rizky Octa Putri. (2016). *Kepentingan Iran melakukan intervensi terhadap konflik internal Yaman tahun 2014-2015*. JOM Fisip. Vol. 3 No.2. Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/33229-ID-kepentingan-iran-melakukan-intervensi-terhadap-konflik-internal-yaman-tahun-2014.pdf>
- esdm.go.id. (2016). Tersedia di <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/indonesia-dan->

- iran-menandatangani-mou-bidang-ketenagalistrikan-dan-energi-baru-terbarukan  
esdm.go.id. (2020). Tersedia di <https://migas.esdm.go.id/post/read/impor-lpg-iran-500-ribu-metrik-ton,-presiden-jokowi-berharap-efisiensi-harga-bisa-dilakukan>
- esdm.go.id. (2020). Tersedia di <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/program-35000-mw-terus-jalan-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Fiansyah, Rahmat. (2018). Tersedia di <https://www.inews.id/finance/makro/dijatuhi-sanksi-as-kurs-rial-iran-tembus-100-000-per-dolar-as>
- Gustavsson, Jakob. (1999). *How should we study foreign policy change? cooperation and conflict*. Vol 34. Harvard.
- Indraini, Anisa. 2020. Tersedia di <https://finance.detik.com/energi/d-4887248/diprediksi-molor-ke-2029-ini-penyebab-proyek-35000-mw-tersendat>
- Kalicki, Jan H. and David L. Goldwyn. (2005). *Energy and security: toward new foreign policy strategy*. Washington DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Kompas. (2018) Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/17020121/wapres-kallaterima-wapres-iran-bicara-soal-investasi-dan-perdagangan>
- Krisna, Didi. (1993). *Kamus politik internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (1987). *Hubungan internasional: kerangka studi analisis*. Jakarta: Bina Cipta
- Landry, Carole. (2015). Tersedia di <https://www.middleeasteye.net/news/iran-arming-yemens-houthi-rebels-2009-un-report>
- Majidi, Ali Feghe and Zahra Zarouni. (2016). *The impact of sanctions on the economy of Iran*. Tersedia di <https://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/Other/FREIT1140.pdf>
- Mehr News Agency. (2017). Tersedia di <https://en.mehrnews.com/news/125685/Iran-builds-ME-s-1st-mobile-power-plant>
- Michnalita, Puteri. (2021). *Dampak sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap kerjasama Indonesia – Iran di bidang ketenagalistrikan*. Tersedia di [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Putri%20Michnalita%20\(12-24\)%20\(02-26-21-06-18-40\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/Jurnal%20Putri%20Michnalita%20(12-24)%20(02-26-21-06-18-40).pdf)
- Primadhyta Safyra. (2018). Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180111093220-85-268063/baru-3-persen-dari-proyek-35-ribu-mw-yang-beroperasi>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). <https://setkab.go.id/kumpulkan-investor-presiden-jokowi-tegaskan-proyek-listrik-35-ribu-mw-kebutuhan/>
- Soltaninejad, Mohammad. (2017). *Iran–India relations: the unfulfilled strategic partnership*. India Quarterly. Vol. 73 No.1. Tersedia di [https://www.researchgate.net/publication/313218403\\_Iran-India\\_Relations\\_The\\_Unfulfilled\\_Strategic\\_Partnership](https://www.researchgate.net/publication/313218403_Iran-India_Relations_The_Unfulfilled_Strategic_Partnership)
- Starke, JG. (2001). *Pengantar hukum internasional*. Jilid 1,2. Jakarta: Sinar Grafika
- Qorina, Aulia. 2019. *Hambatan Kerjasama Pembangunan Pipa Gas Iran-Pakistan*. Tersedia di <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2959>
- Zuraya, Nidia. 2017. *Kunjungi Iran, Luhut akan pastikan Pertamina mendapat proyek*. Tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/0u5lpr383/Antara>